

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arianto, Agus Yusuf. 2013 *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jenggala Pustaka Utama, Surabaya
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apeldoorn, Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Diterjemahkan dari buku inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan Budiarta, I Nyoman Putu. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aristotles, 2009, *The Nicomachean Ethics*, Oxford University Press, New York.
- Bachtar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten.
- Diantha, I. Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Garner, Bryan A. 1999, ed., et al., *Black's Law Dictionary*, 8th ed., West Publishing, St. Paul Minn
- Hadjon, Philipus M. 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Gajah Mada Press, Yogyakarta

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Harry Woolf. *Protection of the Public : a New Challenge*. Stevens & Sons, London, 1990.
- Indra B. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama, Erlangga. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2005, *The Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, The Law book Exchange, New Jersey.
- _____, 1991, *General Theory of Norm*, Clarendon Press, Oxford.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- _____. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Marzuqi, Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta
- Mubyarto, 1998, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, cet.1, LP3ES, Jakarta
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nugraha, Safri. *et.al*, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi *Center For Law And Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta
- Nuswardani, 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Administrasi*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Purbopranoto, Koentjoro. 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Cet.4. Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Richo Andi Wibowi, 2022, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. UGM PRESS, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soeroso, R. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi, Wila Ch. 1998, *Percikan Gagasan tentang Hukum ke-III*, Mandar Maju, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W. 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT Gramedia, Jakarta
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Utama J. Yos, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 2. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Utrecht, E. 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. 4, Universitas Padjajaran, Bandung

HASIL PENELITIAN DAN JURNAL

- Arrowsmith, S. "Horizontal policies in public procurement: a taxonomy", *Journal of Public Procurement*, Vol. 10 No. 2, 2010.
- Darmansyah, "Analisa Yuridis Normatif Memorandum Of Understanding (Mou) Antara Tni Dengan Kepolisian Ri Nomor: B/2/I/2018 Dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang Perbantuan Tni Kepada Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Harkatibmas) Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum." *Ph.D dissertation*, University of Muhammadiyah Malang, 2019.
- Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Uninsulla*, Vol. XVI, No. 1, Maret 2006.
- Dekel, O., "The Legal Theory of Competitive Bidding for Government Contracts", *Public Contract Law Journal*, Volume 37, Nomor 2, 2008

Elpah, Dani. dan F. Manao, Disiplin. "Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 2, No. 1, 2019.

Elviandri dkk, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No 2 Vol 31, 2019.

Hadiyono, Venatius. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, No.1, 2020.

Muhammad Iqbal. Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No.1, 2020.

Lismanto, dan Utama, J. Yos. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 3, 2020.

Keuangan, Badan Pemeriksa, "Auditorat Utama Keuangan Negara : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2020 Pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dan Instansi Terkait Lainnya", Jakarta, Mei 2021.

_____, "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan: Semester II", Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021.

_____, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 10/LHP/XV/02/2022, Februari Tahun 2022.

_____, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Prakerja Tahun 2020 Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya, Jakarta, 2020.

Nurhadi, Wahyu. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *J. Polit. Sci.*, No.1, 2020.

S. K. Pachauri. "Natural Justice and Ethics in Administration." *Indian Journal of Public Administration* 41, no. 3, 1995.

Sirait, Timbo Mangaranap. "Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016.

Wibowo, Richo Andi. Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?). " *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 1, no. 1, 2015

_____, "Analisa Kebijakan Kartu Prakerja - Perspektif Kontrak Pemerintah & Hukum Administrasi", *Diskusi Unit Jaminan Mutu FH UGM*, 08 mei 2020.

Widiastiani, Nindry Sulistya. "Polemik Kartu Prakerja Sebagai Kebijakan Bidang Hukum Ketenagakerjaan Masa Pandemi Covid-19." *Literasi Hukum* Vol. 5, No.2 , 2019.

ARTIKEL INTERNET

Alvisena, M. Ilham Ramadhan. "Mitra Kartu Prakerja disebut Bukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa", *Artikel* diakses melalui laman <https://mediaindonesia.com/ekonomi/327903/mitra-kartu-prakerja-disebut-bukan-bagian-pengadaan-barang-jasa> pada tanggal 30 April 2022.

Dhika Kusuma Winata, "Jokowi Teken Revisi Perpres kartu Prakerja, Ini Isinya", *Artikel* diakses melalui laman <https://mediaindonesia.com/read/detail/327140-jokowi-teken-revisi-perpres-kartu-prakerja-ini-isinya> pada tanggal 1 Desember 2021.

Franedy, Roy. "KPK Endus Konflik Kepentingan di Platform Digital Prakerja", *Artikel* diakses melalui laman <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200619100451-37-166495/kpk-endus-konflik-kepentingan-di-5-platform-digital-prakerja> pada tanggal 29 April 2022.

Hakim, Rakhmat Nur. "Tanpa Tender, Penentuan Mitra Kartu Prakerja Dijamin Tetap Transparan", *Artikel* diakses melalui laman <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/19053901/tanpa-tender-penentuan-mitra-kartu-prakerja-dijamin-tetap-transparan> pada tanggal 28 Juni 2022

Indonesia, BBC. “KPK Sebut kartu Prakerja ‘Terdapat Konflik Kepentingan’, Tanda-tanda Ke Tindak Pidana Korupsi,” *Artikel* diakses melalui laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia53114061> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Jamela A. Ali, “Duty to Give Reason – The Way Forward”, 2008, diakses melalui laman <http://www.guanyeslawyer.com/article-dutytogivereasons.html> tanggal 28 Agustus 2022

Kurniawati Endri, “Dua Potensi Kerugian Negara dalam Kartu Prakerja Menurut KPK”, *Artikel* diakses melalui laman <https://nasional.tempo.co/read/1355761/dua-potensi-kerugian-negara-dalam-kartu-prakerja-menurut-kpk> pada tanggal 1 desember 2021.

Kerjo, “Kartu Prakerja, Bagian Wujud Peduli Jokowi pada Pekerja, *Artikel* diakses melalui laman <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja> pada tanggal 2 Juni 2022.

LKPP, “Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018”, *Artikel* diakses melalui laman <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5835> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Safitri, Agnes. “Menyoal Kartu Prakerja di Tengah Virus Corona”, *Artikel* diakses melalui laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200417065308-92-494413/menyoal-kartu-prakerja-di-tengah-virus-corona> pada tanggal 1 Desember 2021.

Sarwohadi, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi”, *Artikel*, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, *Artikel* diakses melalui <https://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf> pada tanggal 10 Juni 2022

Taher, Andrian Pratama. Polemik Prakerja Jokowi, Ruangguru, dan Belva Yang Belum Selesai, *Artikel* diakses melalui laman <https://tirto.id/polemik-prakerja-jokowi-ruangguru-belva-yang-belum-selesai-eVig> pada tanggal 29 April 2022.

Tim Jawapos, “Kartu Prakerja Jadi Jaring Pengaman Sosial”, *Artikel* diakses melalui laman <https://www.jawapos.com/nasional/24/04/2020/kartu-prakerja-jadi-jaring-pengaman-sosial/> pada tanggal 1 Desember 2021.

Tirta, “Tujuan Penelitian : Eksploratif, Deskriptif, Eksplanatif, dan Evaluatif,” *Artikel*, Diakses melalui laman <https://ir.binus.ac.id/2020/05/04/youtube->

[tujuan-penelitian-eksploratif-deskriptif-eksplanatif-dan-evaluatif/](#) pada tanggal 22 April 2022.

Wana Alamsyah, dkk, “Perpres Baru Jokowi Langgengkan Pelanggaran Kartu Prakerja, *Artikel* diakses melalui laman <https://antikorupsi.org/id/article/terbitkan-perpres-baru-jokowi-langgengkan-pelanggaran-kartu-prakerja> pada tanggal 1 Desember 2021.